

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah arus demokratisasi dan keterbukaan saat ini, komunikasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin penting. Urgensitas komunikasi politik dalam hal ini bukan hanya untuk kalangan para elit politik, melainkan bagi seluruh warga masyarakat dalam suatu negara baik pemerintah maupun rakyat sipil. Komunikasi politik mengambil peran penting dalam menentukan masa depan suatu negara. Demikian dengan politik dalam demokrasi pancasila yang mana komunikasi politik itu sendiri menjadi jembatan dalam mengambil setiap kebijakan dalam lembaga pemerintahan. Dengan komunikasi politik pulah masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Sebab itu, hubungan antara pemerintah dengan rakyat dan sebaliknya hubungan antara rakyat dengan pemerintah memerlukan komunikasi politik yang cerdas dan solutif agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Namun membicarakan komunikasi politik tidak semudah membicarakan gerakan politik. Kesulitan itu muncul karena ada dua konsep yang mengusung disiplin ilmu ini, yakni konsep komunikasi dan politik. Secara etimologis kata komunikasi berasal dari kata bahasa Latin, *communis*, yang berarti membuat atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih.¹ Penulis mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyampaikan pesan kepada orang lain dan menerima pesan dari orang lain agar terjadi saling pengertian. Sedangkan politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik. Sementara itu, menurut David Easton, ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making of public policy*).² Sebab dari pada itu, kedua konsep ini tidak dapat dilepaspisahkan

¹ Efriza dan Jerry Indrawan, *Komunikasi Politik, Pemahaman Secara Teoretis dan Empiris* (Malang: Intrans Publishing, 2018), Hlm, 3.

² *Ibid.*, Hlm. 6.

antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, baik secara teori maupun praktik. Artinya politik tidak dapat mencapai tujuannya jika tanpa adanya komunikasi yang dibangun di dalam suatu wilayah masyarakat sipil dan lembaga pemerintahan. Demikian pun sebaliknya. Masyarakat sipil dan pemerintah yang secara praktis mampu membangun komunikasi yang produktif, akan sangat mungkin untuk dapat mencapai suatu tujuan politik.

Dalam sejarah perkembangan politik di Indonesia tercatat bahwa negara Indonesia telah menjalankan lima model demokrasi perwakilan sejak tahun 1945 hingga saat ini. Dr. Thomas Tokan Purek Lolon, membagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi beberapa periodisasi yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa Revolusi, Orde Lama, masa Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan masa Reformasi.³ Dari kelima pembabakan demokrasi di Indonesia ini, perhatian penulis akan lebih fokus pada masa Reformasi. Sebab, masa reformasi diyakini sebagai masa di mana masyarakat diberi ruang yang bebas untuk mengekspresikan hak politik mereka melalui pemilihan umum (Pemilu) yang tentunya sangat demokratis dan khususnya pemilihan umum presiden pertama kalinya yang demokratis hanya terjadi dan sukses dijalankan pada masa reformasi. Masa reformasi dikenal dengan masa di mana setiap individu diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, bebas berbicara mengenai isu-isu politik, tidak seperti pada masa Orde Baru yang hanya diramaikan oleh tiga partai: Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golkar, dan Partai Pembangunan Persatuan. Tidak sedikit orang yang menganggap masa Orde Baru sebagai masa pembungkaman pendapat.⁴ Namun, era pembungkaman ini sesungguhnya tidak hanya ada dan berakhir pada masa kejatuhan Orde Baru. Masih ada warga masyarakat Indonesia yang mengalami penindasan, kebebasannya dibungkam oleh berbagai macam dalil baik agama, suku maupun budaya.

³ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik; Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), Hlm. 68.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 87.

Penulis dalam hal ini, secara khusus menyoroti realita komunikasi politik pada warga masyarakat adat Pel yang tengah mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi politik secara bebas dan terbuka. Realita eksklusivisme komunikasi politik masyarakat adat Pel nampak nyata dalam peristiwa penolakan dan pendiskriminasian terhadap aktivis politik partai NasDem dan PDI-Perjuangan sepanjang masa pra-pemilu legislatif pada 9 April 2019.⁵ Tindakan seperti ini tentu amat kontradiktif dengan prinsip kebebasan individu dan pengakuan hak minoritas dalam berdemokrasi. Politik adalah persoalan publik. Karena politik menyangkut masalah publik, maka politik menuntut keterbukaan dan sejatinya politik bertentangan dengan ketertutupan.⁶ Agus Alfons Duka dalam bukunya menyatakan bahwa kesombongan, penghinaan serta penolakan terhadap orang-orang yang berlainan budaya, dapat memperparah ketegangan dan perbedaan.⁷ Karena itu untuk mengatasi problematik seperti itu, dibutuhkan usaha seperti mengedukasi masyarakat tentang urgensi sikap inklusif dalam berpolitik. Dalam politik, komunikasi menjadi mediator. Tanpa komunikasi, politik hanyalah praktik kekuasaan hambar.⁸ Senada dengan pernyataan tersebut, Michael Schudson mengatakan bahwa komunikasi politik adalah, ‘*any transmission of message that has, or is intended to have an effect on the distribution or use of power in society or an attitude toward the use of power*’ (setiap pengiriman pesan yang dimilikinya, atau memiliki efek pada distribusi atau penggunaan kekuasaan di masyarakat atau sikap terhadap penggunaan kekuasaan).⁹

Berkaitan dengan realita yang tengah terjadi di dalam masyarakat adat Pel, Salesius Medi, mengatakan bahwa sebagian besar warga masyarakat adat Pel masih belum memahami esensi dan eksistensi politik itu sendiri, sehingga kebanyakan dari mereka lebih cenderung melihat politik sebagai satu ruang yang dapat memecah belah

⁵ Hasil *Wawancara* dengan Frumen Tamat, Pel, tanggal 15 Juli 2021

⁶ Paul Budi Kleden, *Catatan Tentang Pemilu, Bukan Doping Politik* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2013), Hlm. 146.

⁷ Agus Alfons Duka (ed.), *Voice in the Wilderness, Pesan Paus Yohanes Paulus II Untuk Hari Komunikasi Sedunia Tahun 1979-2005* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2007), hlm. 91.

⁸ Dedi Kurnia Syah Putra, *Op.Cit.*, Hlm. 138.

⁹ Efriza dan Jerry Indrawan, *Op. cit*, Hlm. 10.

hubungan keluarga.¹⁰ Sementara itu, Bernadinus Said, secara eksplisit mengatakan bahwa masyarakat adat Pel sesungguhnya memahami dan mengerti bagaimana berpolitik dan berkomunikasi politik. Namun, suasana lingkungan masyarakat adat Pel yang terlalu terikat dengan beberapa nilai budaya seperti nilai-nilai kekeluargaan yang terungkap dalam pribahasa *teu ca ambo neka woleng lako, muku ca pu'u neka woleng curup*, yang di mana seharusnya ungkapan ini tidak dapat menjadi referensi dalam berpolitik.¹¹ Ini artinya masyarakat adat Pel enggan bahkan takut berkomunikasi perihal politik karena ditekan oleh suatu keadaan yang cenderung mendominasi dan pada kenyataannya, praktik seperti ini akan berpotensi ke arah lahirnya politik identitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematik politik yang tidak produktif, tulisan ini hadir untuk mengubah cara pandang atau pola pikir masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat adat Pel secara khusus agar tercapainya tujuan reformasi dan terwujudnya Indonesia yang demokratis.

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu; pertama, keprihatinan penulis terhadap realitas masyarakat adat Pel yang cenderung bersikap eksklusif dalam berpolitik. Kedua, penulis meragukan masa depan demokrasi di Indonesia, dimana sampai saat ini panggung politik di wilayah masyarakat adat Pel belum mampu menerapkan politik yang produktif. Ketiga, penulis merasa khawatir terhadap minimnya wawasan masyarakat adat Pel terhadap urgensi komunikasi politik dan demokrasi sehingga berdampak pada menguatnya praktik politik identitas. Keempat, dampak yang terjadi selanjutnya adalah komunikasi politik bukan lagi menjadi sarana yang baik untuk mencapai tujuan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, tetapi menjadi panggung persaingan yang destruktif.

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Dalam tulisan ini, penulis menaruh minat besar pada judul **Dampak Destruktif Eksklusivisme Komunikasi Politik Masyarakat Adat Pel Bagi Keberlangsungan**

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Salesius Medi, Peot pada, tanggal 20 Juli 2021.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bernadinus Said, Warat pada, tanggal 2 Agustus 2021.

Demokrasi Di Indonesia. Penulis memilih judul Dampak Destruktif Eksklusivisme Komunikasi Politik Masyarakat Adat Pel bagi Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia karena didorong oleh beberapa alasan yang melatarbelakanginya yakni realitas masyarakat adat Pel yang belum memahami prinsip-prinsip demokrasi dan khususnya dalam hal memaknai dampak konstruktif komunikasi politik. Akan tetapi, karena wilayah cakupan tentang komunikasi politik sangat luas maka, dalam tulisan ini penulis memfokuskan perhatiannya pada eksklusivisme komunikasi politik yang terjadi dalam masyarakat adat Pel sepanjang masa pesta demokrasi dalam hal ini Pileg (Pemilu Legislatif) pada tahun 2019. Fokus utama dari tulisan ini adalah mengungkapkan dampak destruktif eksklusivisme politik dalam kaitannya dengan keberlangsungan demokrasi di Indonesia yang tengah dipraktikkan oleh masyarakat adat Pel.

1.3 Rumusan Masalah

Karya ilmiah ini ditulis dengan beberapa tujuan **pertama**, secara teoretis untuk mengungkapkan esensi komunikasi politik dan secara kontekstual untuk mengungkapkan dampak destruktif eksklusivisme komunikasi politik masyarakat adat Pel dalam panggung demokrasi yang sejauh ini terungkap dalam praktik politik masyarakat bersangkutan. **Kedua**, menjadikan skripsi ini sebagai sumbangan yang berharga bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat adat Pel yakni masyarakat dari mana penulis berasal. **Ketiga**, mengungkapkan ketidakrelevanan sikap eksklusif dalam berpolitik bagi masyarakat adat Pel dewasa ini. **Keempat**, sebagai persyaratan akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Keseluruhan uraian yang terdapat dalam tulisan ini menggunakan beberapa metode. Metode-metode itu adalah metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam metode penelitian lapangan ini penulis akan menemui beberapa tokoh seperti para politisi dan tokoh adat yang kredibilitasnya teruji dan tentunya yang mendiami wilayah atau kampung yang menjadi acuan dalam tulisan ini. Selain itu,

adapun penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan menjadi metode yang dipilih penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini. Meskipun sumber-sumber yang didokumentasikan dari masyarakat ini sangat minim dan bahkan tidak ada sama sekali namun, tahap-tahap yang berhubungan dengan sikap eksklusif politik dalam berdemokrasi telah banyak didokumentasi dalam sumber-sumber tertulis seperti buku-buku yang telah dituliskan oleh para cendekiawan, aktivis politik terdahulu baik orang-orang asing maupun orang pribumi. Penulis menyadari bahwa dalam setiap praktik politik dan berdemokrasi oleh masyarakat Pel mengalami kemiripan namun perbedaannya terletak pada faktor-faktor dasar yang membentuk kepribadian masyarakat tertentu. Selain itu penulis sendiri menjadi sumber tambahan karena penulis pernah ada di tengah masyarakat Pel dan tinggal bersama masyarakat ini selama beberapa waktu. Penulis pun telah menyaksikan secara langsung mengalami bagaimana masyarakat adat Pel berpolitik dengan pandangan yang telah diwarnai oleh faktor budaya setempat.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, tulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut: bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan dan metode penulisan. Bab II memuat pengenalan Masyarakat Adat Pel. Bab III menjadi bagian utama dari tulisan ini yakni nilai-nilai budaya Masyarakat Adat Pel dalam kaitannya dengan eksklusifisme komunikasi politik masyarakat Adat Pel. Bab IV merupakan ulasan praktis komunikasi politik masyarakat adat Pel dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Penulis menggunakan prinsip demokrasi ini sebagai jalan edukatif untuk memberi pencerahan dan membuka wawasan berpikir masyarakat adat Pel dalam upaya memperlihatkan konsep-konsep budaya yang tidak dapat dijadikan sebagai referensi dalam berpolitik dan menemukan solusinya, serta membentuk pola pikir dan sikap kritis masyarakat adat Pel dalam berpolitik demi tercapainya suatu tujuan politik. Dan Bab V merupakan akhir dari keseluruhan tulisan ini. Di dalamnya terdapat beberapa kesimpulan dan usul saran.